



## KRISIS POLITIK THAILAND DAN DAMPAKNYA TERHADAP KAWASAN

Sita Hidriyah\*)

### Abstrak

*Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dituntut oleh masyarakat Thailand untuk mundur dari jabatannya. Demonstrasi besar-besaran ini dipicu kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah. Para demonstan menilai dukungan pemerintah atas RUU tersebut merupakan upaya untuk memberi peluang Thaksin kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman atas kasus korupsi. Untuk menghentikan demonstrasi, PM Yingluck berencana mengadakan Pemilu di bulan Februari. Usul tersebut ditolak oposisi yang menghendaki pembentukan dewan rakyat untuk menjalankan pemerintahan sebelum pemilu, serta melaksanakan reformasi yang memerangi korupsi. Krisis politik yang berlangsung telah sejak tahun 2013 tersebut memukul perekonomian Thailand dan menelan korban jiwa. Hal ini memicu kekhawatiran terkait stabilitas politik dan keamanan di Thailand dan di Asia Tenggara pada umumnya.*

### Pendahuluan

Demonstrasi anti-pemerintah secara besar-besaran telah berlangsung di Bangkok sejak tanggal 13 Januari 2014. Kelompok anti pemerintah (oposisi) serta Komite Reformasi Demokrasi Rakyat atau People's Democratic Reform Committee (PDRC) menuntut PM Yingluck mundur dan melakukan reformasi sebelum pemilu. Demonstrasi ini melumpuhkan Bangkok (Bangkok Shutdown). Kelompok oposisi bersikukuh reformasi sistem pemilu harus dilakukan sebelum pemilu yang independen siap digelar

setidak-tidaknya satu tahun lagi. Mereka menginginkan terbentuknya "dewan rakyat" yang ditunjuk untuk mengawasi reformasi sebelum pemilu mendatang. Dekrit keadaan darurat diberlakukan untuk meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa pemilu dini 2 Februari yang ditentang oleh para demonstan dapat berjalan tanpa gangguan. Sampai pada tanggal 22 Januari 2014, demonstrasi anti-pemerintah terus berlanjut di ibukota Bangkok sementara demonstrasi dengan kekerasan telah meluas di wilayah Thailand utara.

\*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id



## Bangkok Shutdown

*People's Democratic Reform Committee* (PDRC) mengancam akan melumpuhkan Bangkok (Bangkok Shutdown) dengan tidak mengenal batas waktu. Hal tersebut dilakukan dengan menutup jalan utama ke kompleks pemerintahan serta pusat perekonomian. Demi alasan keamanan para pegawai pemerintah diliburkan, namun pusat-pusat bisnis masih tetap beroperasi secara normal. Pelumpuhan tersebut baru akan dihentikan setelah PDRC memenangkan pertarungan. Pergerakan PDRC itu menuai gerakan massa propemerintah di bagian utara Thailand, yang pada pemilu sebelumnya dikuasai partai Pheu Thai yang pro pemerintah. Sejauh ini para pemimpin partai masih percaya bahwa militer tidak akan melancarkan kudeta.

Perdana Menteri Yingluck telah menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia menyatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menjaga demokrasi dan mempunyai tugas konstitusional untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri. PM Yingluck berkeras bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin dalam di Thailand adalah lewat pemilihan umum. PM Yingluck telah memberikan usulan untuk menunda pemilu menjadi 4 Mei 2014 serta mengusulkan pembentukan dewan reformasi nasional sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan krisis politik yang sudah berlangsung beberapa bulan. Jika rakyat tidak lagi menginginkan pemerintahan ini, maka mereka harus datang dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Sebagian besar lawan politik Yingluck tidak menginginkan digelar pemilu. Mereka khawatir lewat pemilu justru keluarga Shinawatra atau sekutunya yang akan berkuasa kembali di Thailand. Kelompok oposisi menolak semua tawaran politik yang diajukan pemerintah berkuasa. Pertikaian politik yang sedang terjadi sepertinya tidak memiliki jalan tengah. Sehingga Yingluck harus mencari alternatif solusi bagi kalangan rakyatnya.

## Dampak Terhadap Perekonomian Thailand

Ketidakstabilan politik di Thailand dapat mengikis prospek jangka pendek pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Secara signifikan roda perekonomian Thailand terlihat tidak mengalami dampak negatif. Namun demikian, jika pertikaian masih terus terjadi, prediksi masa depan suram bisa saja terjadi bagi ekonomi Thailand. Konfrontasi politik telah mengakibatkan penurunan secara signifikan prospek ekonomi tahun 2014. Selain itu, momentum pertumbuhan produk domestik bruto Thailand telah melambat tajam dari tingkat pertumbuhan 6,5 persen pada tahun 2012 menjadi hanya 2,7 persen pada kuartal ketiga tahun 2013. Pemerintah Thailand sendiri baru saja memangkas perkiraan PDB untuk 2014. Menteri Perdagangan Thailand Niwattumrong Boonsongpaisan menyatakan, pada awal Januari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 akan berada di kisaran 3 persen menjadi 3,5 persen, ini jauh lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebelumnya empat dan lima persen. Dampak kerusakan yang utama adalah kemungkinan penundaan proyek-proyek belanja infrastruktur.

Sektor pariwisata, yang menyumbang 7 persen dari PDB mengalami penurunan signifikan. Banyak negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Thailand. Wisatawan mancanegara yang datang ke Bangkok pada pekan pertama Desember 2013 merosot 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012. Bahkan Singapore Airlines membatalkan 19 penerbangan ke Bangkok mulai 14 Januari hingga 25 Februari seiring dengan menurunnya permintaan. Asosiasi Perhotelan Thailand memprediksi tingkat hunian di Bangkok akan anjlok hingga menjadi 70-75 persen pada kuartal pertama dari biasanya yang mencapai 80 persen.

Konflik politik ini mengakibatkan gangguan terhadap perdagangan dan jasa keuangan perbankan dan industri yang terutama berlokasi di ibukota. Arus masuk investasi langsung asing juga cenderung melambat. Namun, produksi sektor pertanian, yang merupakan bagian

penting dari ekonomi Thailand, relatif tidak terpengaruh. Banyak perusahaan multinasional yang hadir di Thailand, mulai mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mempersiapkan risiko dari peningkatan aksi kekerasan.

## Dampak Terhadap Kawasan

Krisis politik Thailand yang belum menemukan solusi ini dikhawatirkan dapat memicu kudeta militer. Jika hal ini terjadi, akan dapat berdampak buruk terhadap kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Dampak buruk bisa saja terjadi pada sektor ekonomi dan politik di kawasan. Dengan posisi sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di ASEAN, lumpuhnya Thailand tentunya dapat mempengaruhi seluruh kawasan. Berbagai kerjasama ekonomi di tingkat ASEAN dapat tidak berjalan. Hal ini tentu mengganggu perekonomian di kawasan ASEAN.

Intervensi ASEAN dalam masalah instabilitas politik Thailand tidak dimungkinkan karena prinsip non-intervensi atau tidak turut campur rumah tangga suatu negara. (ASEAN Way). Instabilitas politik Thailand yang berlarut-larut dikhawatirkan dapat mengganggu rencana ASEAN penyatuan komunitas ekonomi ASEAN 2015, untuk menyatu dan bersaing secara sehat dalam satu wadah yang sama di bidang ekonomi. Dengan kondisi tersebut, ASEAN berharap semua pihak di dalam Thailand mampu menahan diri agar tidak melakukan kekerasan dan menghormati aturan hukum.

Bagi Indonesia secara langsung, kisruh politik di Thailand tidak banyak berpengaruh karena gelombang demonstrasi lebih terfokus di ibukota Bangkok, dan hampir tidak terjadi di daerah-daerah lain sehingga arus produk dari Thailand ke luar negeri tidak banyak pula terkena dampaknya. Indonesia dapat memperoleh dampak positif dari gelombang demonstrasi di Thailand. Dari segi pariwisata, situasi memanas di Bangkok telah memaksa sebanyak 46 negara mengeluarkan travel warning ke Thailand. Terkait kondisi politik Thailand, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok telah mengeluarkan surat pemberitahuan. Surat tersebut berisi himbuan kepada WNI di Thailand atas adanya aksi demonstrasi. Hal ini sebagai peringatan agar WNI tetap merasa aman dan terlindungi.

Situasi politik Thailand juga mendapat reaksi dari negara luar kawasan seperti Amerika Serikat (AS). Walaupun AS tidak mendapat dampak secara nyata, AS mendesak Thailand untuk mencari jalan damai guna menyelesaikan perbedaan pendapat di negeri itu dan menghormati aturan hukum. Selain itu AS juga memuji pengekangan diri pihak berwenang sejauh ini yaitu aparat keamanan dengan sikap menahan diri dalam menyikapi aksi unjuk rasa. AS sendiri sedang bekerja dengan berbagai negara untuk mendorong dialog dan transisi demokrasi yang damai. Thailand merupakan sekutu AS tertua di Asia. Kedua negara menandatangani perjanjian pada tahun 1833. Diplomasi AS yang bertujuan untuk menyelesaikan instabilitas Thailand sempat menuai protes setelah utusan AS bertemu dengan pihak pro-Thaksin. Pada perkembangannya, travel warning dari Departemen Luar Negeri AS telah dikeluarkan sejak 21 Januari 2014 yang mendesak warganya untuk menjauhkan diri dari protes dan pertemuan-pertemuan besar di Bangkok.

## Penutup

Apa yang terjadi di Thailand merupakan sebuah indikasi bahwa proses demokrasi di Asia Tenggara masih akan melalui tahapan yang panjang. Krisis politik Thailand yang berlanjut akan mendorong adanya gelombang ketidakpastian, ketakutan bahkan kekacauan politik yang terjadi lagi sehingga dapat mengguncang stabilitas dan kemandirian Asia Tenggara. Krisis politik di Thailand tidak hanya mengancam industri pariwisata, melainkan juga menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah yang belum menjamin stabilitas keamanan dalam negeri. Seringnya pergantian pemerintahan di Thailand dapat memperkuat asumsi bahwa hal tersebut menjadi semacam tradisi. Dampaknya menjadi tidak terjaganya stabilitas keamanan terutama dalam jangka panjang di Thailand khususnya dan di Asia Tenggara pada umumnya.

Dengan terjadinya krisis politik yang terjadi di Thailand, dapat menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil prakarsa dalam yang lebih aktif dalam upaya penyelesaian krisis politik di Thailand. Pemerintah Indonesia diharapkan

dapat siap memberikan dukungan secara penuh untuk menciptakan situasi kondusif di Thailand meskipun dalam ASEAN, konsep non-intervensi menjadi salah satu prasyarat bagi konstelasi hubungan antar-negara ASEAN. Menyongsong Komunitas ASEAN pada tahun 2015, upaya penyelesaian krisis politik di Thailand menjadi tantangan semua negara anggota ASEAN.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pemimpin di ASEAN tentunya memiliki ruang yang lebih legitimate dalam upaya menetralisasi konflik politik di negara tersebut. Karena jika terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi negara-negara tetangga di wilayah kawasan.

Bahan Senjata Kimia, <http://www.antaraneews.com/berita/412998/suriah-keluarkan-gelombang-pertama-bahan-senjata-kimia> diakses tanggal 14 Januari 2014.

## Rujukan

1. “Krisis Politik Memburuk: Yingluck: Tugas Saya Menjaga Demokrasi dan Demokrasi Milik Rakyat”, Kompas 15 Januari 2014.
2. “Protest: Thai PM Insists She Won’t Resign”, The Jakarta Post 15 Januari 2014.
3. “Protesters Shut Down Bangkok’s City Center”, International New York Times 15 Januari 2014.
4. “Demo Oposisi Thailand di Bangkok Masuki Hari Ketiga”, <http://www.voaindonesia.com/content/demo-oposisi-di-bangkok-masuki-hari-ketiga/1829547.html>, diakses 15 Januari 2014.
5. “Politik Thailand: Oposisi Targetkan Shutdown Hari Ini”, <http://www.koran-sindo.com/node/358170>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
6. “PM Thailand Tegaskan Tak Akan Mundur”, <http://www.voaindonesia.com/content/mekipun-sidemo-pm-thailand-bertekad-tidak-akan-mundur/1829553.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
7. “Thai Opposition Absent From Forum on Election”, International New York Times 16 Januari 2014.
8. “Teror untuk Hasut Militer Thailand Mengudeta”, Media Indonesia 16 Januari 2014.
9. “Tak Suka dengan Pemerintah, Datanglah ke TPS”, Kompas 16 Januari 2014.
10. Suriah Keluarkan Gelombang Pertama